

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kualitas akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor CPI di negara-negara ASEAN. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas akuntansi yang tercermin dalam penerapan standar akuntansi yang lebih baik, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi, dan penyajian informasi keuangan yang transparan, berkontribusi pada pengurangan tingkat korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas akuntansi merupakan instrumen penting dalam upaya memerangi korupsi melalui peningkatan transparansi dan pengurangan asimetri informasi antara prinsipal dan agen.
2. Adopsi IFRS berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor CPI di negara-negara ASEAN. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi standar pelaporan keuangan internasional berperan penting dalam mengurangi tingkat korupsi. Adopsi IFRS mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan, standarisasi praktik akuntansi, dan pengungkapan informasi yang lebih komprehensif, sehingga mempersempit ruang bagi praktik korupsi. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi standar akuntansi internasional sebagai bagian dari strategi anti-korupsi.

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan penelitian, beberapa implikasi praktis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Implikasi untuk Regulator dan Pembuat Kebijakan

Regulator dan pembuat kebijakan di negara-negara ASEAN perlu memberikan prioritas pada peningkatan kualitas akuntansi dan penegakan standar pelaporan keuangan sebagai bagian dari strategi anti-korupsi yang komprehensif. Kebijakan yang mendorong transparansi, pengungkapan yang memadai, dan praktik akuntansi yang baik harus dikembangkan dan ditegakkan. Selain itu, negara-negara yang belum sepenuhnya mengadopsi IFRS harus mempertimbangkan untuk mempercepat proses adopsi, dengan memperhatikan konteks lokal dan kapasitas institusional.

2. Implikasi untuk Pengembangan Teori

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori agensi, khususnya dalam konteks hubungan antara kualitas akuntansi dan mekanisme pengendalian korupsi. Temuan bahwa kualitas akuntansi dan adopsi IFRS berpengaruh positif terhadap skor CPI memperkuat proposisi teori agensi bahwa peningkatan kualitas informasi akuntansi dapat mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

Penelitian ini memperluas aplikasi teori agensi dari konteks tradisional hubungan manajer-pemegang saham ke dalam konteks yang

lebih luas, yaitu hubungan antara pemerintah (sebagai agen) dan masyarakat (sebagai prinsipal). Kualitas akuntansi dan adopsi IFRS bertindak sebagai mekanisme monitoring yang efektif untuk mengurangi konflik agensi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Temuan penelitian juga mengkonfirmasi bahwa mekanisme *corporate governance* melalui kualitas akuntansi tidak hanya relevan di tingkat perusahaan, tetapi juga di tingkat negara dalam upaya memerangi korupsi. Hal ini memperkaya literatur teori agensi dengan memberikan bukti empiris bahwa prinsip-prinsip teori agensi dapat diterapkan dalam konteks makro ekonomi dan kebijakan publik.

3. Implikasi untuk Jurusan S1 Akuntansi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting untuk pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran di program studi S1 Akuntansi. Temuan bahwa kualitas akuntansi memiliki peran strategis dalam memerangi korupsi menunjukkan pentingnya memperkuat materi pembelajaran terkait etika profesi, tata kelola perusahaan, dan peran akuntan dalam menciptakan transparansi.

Program studi S1 Akuntansi perlu mengintegrasikan pemahaman tentang IFRS dan standar akuntansi internasional sebagai bagian integral dari kurikulum, tidak hanya sebagai pengetahuan teknis tetapi juga sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Hal ini akan

mempersiapkan lulusan untuk menjadi akuntan profesional yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap peran sosial profesi akuntansi.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya mengembangkan kemampuan analitis mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara kualitas pelaporan keuangan dengan isu-isu sosial ekonomi yang lebih luas, termasuk korupsi dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan pembelajaran interdisipliner yang mengintegrasikan akuntansi dengan ilmu politik, ekonomi, dan hukum menjadi relevan untuk diterapkan.

4. Implikasi untuk Institusi Pendidikan dan Profesi Akuntansi

Institusi pendidikan tinggi dan organisasi profesi akuntansi harus memperkuat kurikulum dan program pengembangan profesional yang berfokus pada etika, standar akuntansi internasional, dan praktik tata kelola yang baik. Peningkatan kompetensi dan integritas profesional akuntansi akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan, pada akhirnya, pengurangan korupsi. Pendidikan dan pelatihan harus menekankan pentingnya peran akuntan dalam mencegah dan mendeteksi korupsi.

5. Implikasi untuk Perusahaan dan Organisasi

Entitas bisnis dan organisasi di kawasan ASEAN harus memprioritaskan implementasi praktik akuntansi yang berkualitas tinggi dan kepatuhan terhadap standar internasional. Investasi dalam

sistem informasi akuntansi yang handal, pengendalian internal yang kuat, dan sumber daya manusia yang kompeten akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi risiko korupsi. Perusahaan juga harus mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam mengungkapkan informasi keuangan yang relevan kepada pemangku kepentingan.

6. Implikasi untuk Lembaga Anti-Korupsi

Lembaga anti-korupsi di negara-negara ASEAN harus memperkuat kolaborasi dengan regulator keuangan dan profesi akuntansi untuk mengembangkan strategi yang terintegrasi dalam memerangi korupsi. Pengetahuan tentang praktik akuntansi dan standar pelaporan keuangan internasional harus ditingkatkan di kalangan penyidik korupsi. Program pencegahan korupsi harus memasukkan komponen yang berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

7. Implikasi untuk Kerjasama Regional

Negara-negara ASEAN harus memperkuat kerjasama regional dalam harmonisasi standar akuntansi, pertukaran praktik terbaik dalam peningkatan kualitas akuntansi, dan koordinasi upaya anti-korupsi. Platform seperti *ASEAN Federation of Accountants* (AFA) dapat memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas

akuntansi dan adopsi IFRS di tingkat regional, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengurangan korupsi.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil dan pengembangan penelitian di masa depan:

1. Keterbatasan dan Saran *Missing Data*

Penelitian ini menghadapi kendala berupa data yang hilang pada beberapa variabel penting. Ketersediaan data *Perceived Accounting Quality* (PAQ) tidak mencakup beberapa negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Laos, dan Myanmar pada periode tertentu karena ketidakterlibatan negara-negara tersebut dalam survei internasional. Data *Corruption Perceptions Index* (CPI) untuk Brunei Darussalam pada tahun 2014-2015 juga tidak dapat diakses akibat keterbatasan sumber data di negara berkembang.

Data variabel budaya (PDI, IDV, MAS, UAI) untuk Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar tidak tersedia sepanjang periode penelitian karena belum pernah dilakukan survei budaya secara komprehensif di negara-negara tersebut. Data *Economic Freedom World* (EFW) untuk Brunei Darussalam pada tahun 2009 pun tidak tercatat akibat keterbatasan informasi ekonomi. Kondisi ini

memengaruhi kelengkapan analisis dan mempersempit ruang generalisasi hasil penelitian di kawasan ASEAN.

Missing data merupakan permasalahan umum dalam penelitian yang memerlukan penanganan yang tepat. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini, masing-masing dengan karakteristik dan keunggulan tersendiri.

Listwise atau *Case Deletion* merupakan metode paling sederhana yang sering digunakan peneliti. Pendekatan ini bekerja dengan mengeliminasi seluruh kasus yang mengandung data hilang dan hanya menganalisis data yang lengkap. Meskipun mudah diterapkan, metode ini memiliki kelemahan signifikan berupa potensi bias apabila data tidak memenuhi asumsi *Missing Completely at Random* (MCAR) dan dapat mengurangi ukuran sampel secara drastis.

Pairwise Deletion menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan semua data tersedia untuk setiap analisis spesifik tanpa menghapus keseluruhan kasus ketika hanya sebagian data yang hilang. Namun demikian, pendekatan ini dapat menghasilkan matriks korelasi yang tidak positif definit dan parameter yang dihitung dari subset data berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi hasil.

Maximum Likelihood (ML) menggunakan pendekatan yang lebih canggih dengan mengestimasi parameter berdasarkan data tersedia

sambil mengasumsikan data mengikuti distribusi tertentu seperti multivariat normal. Data hilang kemudian diestimasi berdasarkan parameter yang telah diperhitungkan. *Expectation-Maximization* (EM) merupakan salah satu implementasi ML yang melakukan iterasi antara estimasi parameter dan imputasi data hilang hingga mencapai konvergensi.

Multiple Imputation menerapkan strategi prediksi nilai data hilang menggunakan variabel lain yang berkorelasi, kemudian mengganti nilai hilang dengan nilai prediksi tersebut. Proses ini diulang beberapa kali untuk menghasilkan beberapa dataset lengkap yang berbeda. Analisis dilakukan pada setiap dataset secara terpisah, dan hasilnya digabungkan untuk menghasilkan estimasi yang valid dengan mempertimbangkan variabilitas dan ketidakpastian data hilang.

Pencegahan *Missing Data* tetap menjadi strategi terbaik yang dapat diterapkan. Perencanaan studi yang matang dan pengumpulan data yang teliti sejak awal dapat meminimalkan jumlah data hilang secara signifikan, sehingga mengurangi kompleksitas analisis dan meningkatkan validitas hasil penelitian.

Pemilihan metode penanganan *missing data* harus disesuaikan dengan karakteristik data hilang dan asumsi yang dapat dipenuhi dalam penelitian. Metode statistik canggih seperti *multiple imputation* dan *maximum likelihood* sangat direkomendasikan setelah upaya maksimal

untuk mengurangi *missing data* telah dilakukan, karena memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan dibandingkan metode sederhana (Kang, 2013).

2. Keterbatasan dan Saran Pengukuran Variabel

Pengukuran kualitas akuntansi menggunakan *Perceived Accounting Quality* (PAQ) dan adopsi IFRS menggunakan skala sederhana yang tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas variabel-variabel tersebut. Demikian pula, pengukuran korupsi menggunakan *Corruption Perceptions Index* (CPI) didasarkan pada persepsi.

Keterbatasan penelitian tersebut dapat diatasi melalui adopsi pendekatan pengukuran yang lebih beragam dan objektif. Peneliti dapat memanfaatkan metrik berbasis laporan keuangan sebagai alternatif *Perceived Accounting Quality* (PAQ), seperti manajemen laba melalui *discretionary accruals* (Dechow dkk., 1995) dan pengakuan kerugian tepat waktu atau *timely loss recognition* (Basu, 1997).

Penelitian juga dapat mengkaji tingkat kepatuhan terhadap standar IFRS spesifik sebagai pengganti skala sederhana (Daske dkk., 2008), atau menganalisis perubahan properti laba seperti *income smoothing* pasca-adopsi IFRS (Barth dkk., 2008).

Corruption Perceptions Index (CPI) yang berbasis persepsi dapat dilengkapi dengan survei berbasis pengalaman yang menanyakan pengalaman langsung responden dengan praktik korupsi seperti

penyuapan (*Transparency International*, berbagai tahun). *Control of Corruption Index* (CC) dari Bank Dunia juga menawarkan ukuran korupsi sektor publik yang lebih komprehensif (Kaufmann dkk., 1999).

3. Keterbatasan Perspektif Teoritis

Penelitian ini memiliki keterbatasan perspektif teoretis karena hanya menggunakan teori agensi sebagai kerangka tunggal, sehingga belum mempertimbangkan faktor institusional yang dapat mempengaruhi efektivitas kualitas akuntansi dalam mengurangi korupsi. Pendekatan ini mengasumsikan homogenitas institusional antar negara ASEAN, padahal terdapat variasi signifikan dalam kualitas institusi pemerintahan, sistem hukum, dan stabilitas politik yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan teori institusional guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mengapa efektivitas kualitas akuntansi bervariasi antar negara dan meningkatkan daya prediksi model dengan memasukkan variabel institusional seperti *rule of law* dan *government effectiveness* sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut.

4. Keterbatasan Variabel Kontrol

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan variabel kontrol yang tidak optimal. Meskipun menggunakan variabel kontrol budaya (PDI, IDV, MAS, dan UAI) dan ekonomi (GDP, dan EFW),

hasil analisis menunjukkan hanya UAI dan EFW yang signifikan dalam menjelaskan variasi Indeks Persepsi Korupsi. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa variabel kontrol lainnya tidak memberikan kontribusi bermakna, kemungkinan disebabkan oleh multikolinearitas atau ketidaksesuaian konteks regional ASEAN.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel kontrol yang lebih relevan dengan konteks korupsi. World Bank mengidentifikasi enam dimensi tata Kelola, yaitu *Voice and Accountability*, *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, *Control of Corruption* yang dapat memberikan kontribusi signifikan. Variabel kontrol alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain *Rule of Law Index*, *Government Effectiveness*, *Political Stability*, dan *Regulatory Quality* dari World Governance Indicators, serta indikator transparansi pemerintahan dan tingkat pendidikan yang lebih spesifik untuk kawasan ASEAN guna meningkatkan validitas dan generalisasi hasil penelitian (Budsaratragoon & Jitmaneeroj, 2020).